

**IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ROHMAN ARIF

NPM : 1621020453

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI
ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

ROHMAN ARIF
NPM : 1621020453

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Nurnazli., S.H.,S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Eti Karini., S.H.,M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. bagaimana Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?, 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Peran Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan?. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli, Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, Undang-undang, kamus hukum, dan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data Peneliti ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dan hasil penelitian yang dapat di dapat bahwa: I. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, tetapi belum terlaksana secara maksimal disebabkan: a. karena kurangnya fasilitas di bidang sumberdaya manusia seperti kurangnya tenaga pendamping psikologis, yang mana selama ini masih dibantu oleh psikologis dari Unit Pelaksana Tingkat Daerah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, b. Kurangnya fasilitator sosialisasi tentang kekerasan anak, c. belum tersedianya lembaga bantuan hukum yang melekat dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus”, d. belum tersedianya gedung atau kantor yang menetap untuk menjalankan upaya peran tersebut serta kurangnya sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat tentang keberadaan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. II. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tidak bertolak belakang dalam Fiqh Siyasah. Dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan Fiqh Siyasah untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohman Arif
NPM : 1621020453
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Pada Dinas PP Dan PA Kabupaten Tanggamus). Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 1 Juli 2020

Penulis,

Rohman Arif
NPM : 1621020453

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Rohman Arif

NPM : 1621020453

Jurusan : Siyasa Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MELINDUNGI

ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Dinas PP

dan PA Kabupaten Tanggamus)

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.Hum

NIP. 1973308162003122003

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TANGGAMUS DALAM MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"** (Studi Pada Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus).di susun oleh **Rohman Arif NPM.1621020453** Program Studi:**Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Rabu 9 September 2020

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dra. Firdaweri, M.H.I

(.....)

Sekertaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji Utama : Mohammad Yasir Fauzi, M.H

(.....)

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

(.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H. Khairuddin, M.H
NPM. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

(QS. Al-Israa [17] :31)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku Tercinta dan Tersayang, Ayahanda Fauzi dan Ibunda Sumarni yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan, memberi semangat, dukungan, motivasi, dan tak pernah hentinya selalu mendo'akan penulis agar dapat meraih kesuksesan.
2. Kakak ku tersayang Iin Marwiyah dan Khoirul Anam yang selalu mensupport dan telah banyak memberikan bantuannya baik formil maupun materil serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.
3. Adik ku Nurul Maisyah semoga ini menjadikan motivasi untukmu supaya dapat terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'hadud Darussa'adah pimpinan abah Ustad Luzen dan Umi Siti Sa'diyah beserta Keluarga dan alumni yang telah menerima penulis menjadi santri, memberi ilmu serta mendidik dengan penuh kasih sayang. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh abah dan umi barokah dunia dan akhirat. Aminn
5. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rohman Arif dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1998, di Desa Padang ratu Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus dan merupakan putra ketiga dari empat bersaudara dari bapak Fauzi dan ibu Sumarni. Berikut Riwayat Pendidikan penulis :

1. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Padang ratu Kecamatan Limau yang diselesaikan pada tahun 2010.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS AL-KHAIRIYAH Talang padang diselesaikan pada tahun 2013.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 PRINGSEWU yang diselesaikan pada tahun 2016.
4. Dan pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syari'iyah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Siyasah Syar'iyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah.

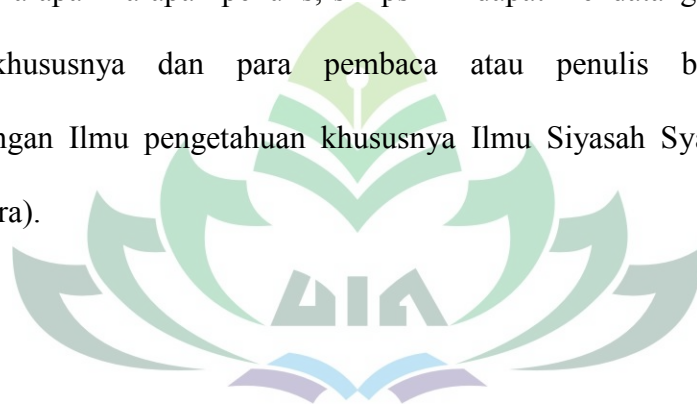
Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa membantu baik dalam materil maupun immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Berikut ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. Khairuddin, M.H.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. H. A Khumaidi Jaf'ar, S. Ag., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Zuhraini S.H., M.H.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
6. Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Frenki, M.Si.
7. Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Hervin Yongky Pradikta, M.H.I.
8. Ibu Dr. Hj Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing 1 dan Ibu Eti karini., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis dan memberikan arahan demi selesainya skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.
10. Tim Support: Hadi Futra, Robby Kurnia, Alex, Nendi, Nezzi, Endang, Najma, Rayen, Ayu, Fuad, Shofa Marwah, Atika Putri, Lisa Anisa Frichillia yang menjadi pendukung memberi semangat, motivasi, dan inspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini
11. Sahabat seperjuangan kosan pendekar leng : Dasef, Dedy, Ican, Yana, Ridho, Yusuf, Bayu, Rahmad, Rake, Dandi, Dayat, yang selalu kocak, dan selalu menghibur dan Bersama-sama berjuang dari awal sampai detik ini.
12. Teman-teman KKN kelompok 86 desa Gedung wani timur: Keluarga besar bapak Yadi dan ibu Sri. Kawan-kawan Sofia, Rosada, Ghaza, Sayma, Masagus, Rinda, Salma, Siti Fatimah, Novita yana, Nari, Deri. Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin sampai saat ini.

13. Teruntuk teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Kelas (i) Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang syari'ah dan keislaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).



Bandar Lampung, 1 Juli 2020

Penulis,

Rohman Arif
NPM. 1621020453

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penjelasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Kekerasan Terhadap Anak	
a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	16
b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	18
c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan	22
d. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	25
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan	
a. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	28
b. Dasar Hukum Perlindungan Anak	35
c. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Dan Hukum Islam	38
3. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah	
a. Pengertian Fiqh Siyasah	52
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	54
c. Macam-Macam Kajian Fiqh Siyasah.....	56
B. Tinjauan Pustaka	61

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Latar Belakang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus	64
B. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus	66
C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus	67
D. Dasar Hukum	69
E. Data Kekerasan Anak Kabupaten Tanggamus	70
F. peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi anak sebagai kekerasan	70
G. upaya-upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan	74

BAB IV ANALISIS MASALAH

A. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan	89
B. Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Rekomendasi	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blanko Konsultasi
- Lampiran 2 Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Provinsi
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Dinas PP & PA Tanggamus
- Lampiran 6 Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



BAB I PENGANTARAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Pada Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus). Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, terlebih dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun oleh Dinas PP dan PA secara matang dan terperinci guna melaksanakan tugasnya dalam hal melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.¹
2. Melindungi Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

¹Imron, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Karya Ilmu 1992), h.78.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan agar terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.²

3. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana³
4. Perspektif Fiqh Siyash adalah satu disiplin ilmu yang mempelajari hal ikhwal atau seluk beluk yang mengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat ajaran islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus merupakan lembaga perlindungan anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanggamus.⁵

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa yang dimaksud dengan judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan yang akan dilakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.

²Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

⁴Ahmad Sukarja, syarief ibnu mujar, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fikih dan Konuu* (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.86

⁵Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong di pilihnya judul skripsi ini sebagai bahan untuk penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Secara objektif, penelitian terhadap Implementasi Dinas PP dan PA dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Tanggamus perlu dibahas karena pelaksanaannya kurang terkendali dengan baik dan sampai saat ini masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, atau perlakuan salah yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Penelitian meninjau pandangan fiqh siyasah terhadap Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan.
2. Secara Subjektif
 - a. Judul skripsi ini sangat relevan pembahasannya dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam konsideran Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dari harta lainnya. Karena itu, anak adalah amanah tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.⁶ Karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan

⁶Nasir djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2013), h.8

sehari-hari. Di dalam Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM.⁷

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lebih lanjut, pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Pemerintah dan Negara juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan orang tua dan wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁷Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Hak anak terdapat dalam pasal 52-56

Namun pada kenyataannya, semakin minim sekali anak-anak yang dapat berkenaan dengan hak-hak dasar dari anak. Banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang melainkan cenderung mendapatkan perlakuan kasar. Berdasarkan keterangan dari pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus, terdapat beberapa contoh kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2019 yaitu sebanyak 32 kasus dimana dari kasus-kasus tersebut yang sering terjadi yaitu pelecehan seksual (10 kasus), kekerasan fisik (12 kasus), perdagangan orang (6 kasus), dan perebutan hak asuh anak (4 kasus). Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu, tetapi dilakukan oleh orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.

Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengeluarkan dan menetapkan peraturan Bupati Tanggamus Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Landasan dibentuknya peraturan ini adalah Anak merupakan aset bangsa sehingga diperlukannya perlindungan secara terpadu dan berkesinambungan dan dibutuhkan perhatian yang lebih serius.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental

dan sosial.⁸Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak didalamnya. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang harus dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.⁹

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum Islam (Fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *Hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya secara bahasa (etimologis), *Hadhanah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak” kata ini berasal dari *Al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hadhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di

⁸Maidin Gultom, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem peradilan pidana anak indonesi*”, Retrika Aditama, Bandung, h. 33.

⁹Hani Shalihah, “Al- Afkar, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal For Islamic Studies*, Vol.1 No.1 (Jakarta 2018), h.38.

lambung (pangkuan) nya. Adapun menurut istilah hadhanah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹⁰

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang di anugrahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.¹¹

Didalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.¹² Sebagaimana Firman Allah SWT :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”

(Q.S. Al-Kahfi[18]: 46)

¹⁰Ibid.h.40.

¹¹Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta : KPAI, 2007, h.13

¹²Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h.125

Oleh karenanya, sangat penting untuk kita melindungi anak-anak dari tindak kekerasan. Bahkan dalam hal pemerintahan kewajiban yang terpenting bagi seorang pemimpin (imam) ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan Hak Asasi Manusia.¹³ Dan Negara perlu turutan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah” (studi pada Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus).

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Implementasi Dinas PP dan PA dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan yang ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan?

¹³Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.23-24.

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan.
2. Untuk Menganalisis pandangan Fiqh Siyasah tentang Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan.

G. Signifikasi/ Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikankontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan
2. Secara Praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama tentang penerapan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta untuk memenuhi syarat akademik.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.¹⁴ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan

¹⁴Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.119.

¹⁵Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.5.

menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang peran Dinas PP dan PA dalam perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan perspektif fiqh siyasah.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan para pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus.
- b. Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

3. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah bapak Riza Pahlewi Selaku Sekretaris dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanggamus, Ibu Parsiyam S.E. selaku Kepala Bidang bagian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan

Anak, Ibu Samira selaku Kasi bagian Perlindungan Anak, bapak Fauzan abdur rohim S,pd selaku wakil sekretaris P2TP2A Kabupaten Tanggamus dan pegawai-pegawai yang menangani khusus dibidang Perlindungan Anak.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Metode Interview atau wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang langsung berhadapan dan saling melihat dan mendengarkan. Sedangkan menurut Mardalis , Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁶

b. Obsevasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanggamus melalui hasil laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus terdapat 32 kasus di tahun 2019

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h.64

terhadap kekerasan anak yang meliputi pelecehan seksual, kekerasan fisik, perdagangan orang, dan perebutan hak asuh anak.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁷ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸
- b. Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.¹⁹

¹⁷Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta), h.23

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h.45.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kererasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (mumayyiz). Jika tandatanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kata kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari violence. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosa” yang berarti menundukan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan

kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”. Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Menurut Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa¹

¹Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), h.101

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.²Sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik.Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang perlu kita ketahui, di antaranya:

1) Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat,Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya.Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik, yaitu memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok pada anak, dan sebagainya.

²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: P.N Balai Pustaka 1990), h.425

2) Kekerasan Emosional

Tak hanya fisik yang dapat tersakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh bentuk kekerasan emosional, yaitu membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan tidak menunjukkan kasih sayang.

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contoh bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak seksual dengan anak (mulai dari berciuman ataupun melakukan hubungan seks), memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan *call sex*, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lainnya. Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong

masih berusia anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksual segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk dalam kategori kekerasan ini.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu :³

- 1) *emotional abuse*
- 2) *verbal abuse*
- 3) *physical abuse*
- 4) *sexual abuse*

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi :

- 1) *Physical Abuse* (kekerasan secara fisik) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 2) *Psychological Abuse* (kekerasan secara psikologis) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak.

³Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Cet 2 Nuansa, 2007), h. 47

Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang.

- 3) *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.⁴

⁴*Ibid*, h. 47-48

c. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekekerasan

Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan dan tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual yang terjadi pada anak. Dalam definisi tersebut kekerasan bukan hanya soal memukul, melukai, menganiaya, sampai membunuh, tetapi lebih luas dari itu. Menurut Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu:⁵

Pertama, faktor pewarisan kekerasan antar generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tubuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30 persen anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya ada 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua.

⁵Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak* (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 56.

Kedua, faktor Stres sosial. Stres sosial ditimbulkan oleh beberapa kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi sosial ini mencakup: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger-than-average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian (*the death*) seseorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan (*poverty*). Tindakan kekerasan terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya, tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak diantara keluarga miskin karena beberapa alasan. Keluarga yang lebih kaya memiliki waktu yang lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Selain itu, pekerja sosial, dokter, dan sebagainya yang melaporkan tindak kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak keluarga miskin sebagai korban tindak kekerasan dibandingkan dengan keluarga kaya.

Ketiga, faktor Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi

masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stres keluarga atau sosial dengan lebih baik. Lagi pula, kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orangtua ini kurang memungkinkan mengubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

Keempat, faktor Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabdian kepada anak. Misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tanpa masalah. Selain itu, keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau di ambil, bila mana mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang akan dibelanjakan untuk makan dan perumahan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluargakeluarga

yang suami-istri sama-sama bertanggungjawab atas keputusankeputusan tersebut.

Siti fatimah, seorang pemerhati masalah anak mengungkapkan bahwa terdapat enam kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak yaitu: Faktor ekonomi, Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar.⁶ Dan faktor masalah keluarga. Masalah keluarga ini lebih mengacu kepada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup menganiaya anaknya semata-mata sebagai pelampasan atau upaya pelepasan rasa jengkel dan amarahnya terhadap istri, contohnya Seperti perceraian, Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan.

d. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan ada yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, ada yang menjadi sangat pasif dan apatis, ada yang tidak mampu mempunyai kepribadian sendiri, apa yang dilakukan sepanjang hidupnya hanyalah memenuhi keinginan orang tuanya (*parentaal extension*), mereka tidak mampu menghargai dirinya sendiri (*chronically low self-esteem*), ada pula yang sulit menjalin relasi dengan individu lain;

⁶Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*. (Bandung: Citra Aditya, 1999), h. 56

dan yang tampaknya paling parah adalah timbulnya rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya (*self hate*) karena merasa hanya dirinyalah yang selalu bersalah sehingga menyebabkan penyiksaan terhadap dirinya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri seperti bunuh diri dan sebagainya. Tindakan kekerasan terhadap anak begitu mengenaskan. Mungkin belum banyak yang menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik itu bisa menyebabkan kerusakan emosional anak.

Menurut Fentini Nugroho, anak-anak yang masih kecil sering susah tidur dan bangun ditengah malam menjerit ketakutan. Mereka juga ada yang menderita psikosomatik, misalnya asma. Beberapa anak ada pula yang demikian sedih, sehingga sering muntah setelah makan dan berat badannya turun drastis. Anak laki-laki cenderung menjadi sangat agresif dan bermusuhan dengan orang lain, sementara anak perempuan sering mengalami kemunduran dan menarik diri ke dalam dunia fantasinya sendiri. Dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa anak perempuan kemudian merasa semua anak pria itu menyakiti (dan menyebabkan beberapa diantaranya membenci pria), sedangkan anak laki-laki kemudian percaya bahwa laki-laki mempunyai hak untuk memukul istrinya. Orang tua tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di antara mereka begitu mempengaruhi anak. Anak merupakan cermin dari apa yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Jika suasana keluarga sehat dan bahagia, maka wajah anak begitu ceria dan berseri. Sebaliknya jika mereka murung dan sedih, biasanya telah terjadi sesuatu yang berkaitan

dengan orang tuanya. Wadah sosialisasi primer, dimana anak belajar untuk pertama kalinya mengenal nilai-nilai dan cara bertingkah laku, perilaku orang tua sering mempengaruhi perilaku anak-anaknya kelak. Jika kekerasan begitu dominan, tidaklah mengheran jika anak-anak kemudian melakukannya dan bahkan terbawa sampai ia dewasa. Karena kekerasan begitu sering terjadi dalam keluarganya, maka ia menganggap hal itu sebagai hal yang “normal” dan sudah seharusnya.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak di sekolah dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut:

- 1) Dampak fisik, dampak dari kekerasan secara fisik dapat mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka, trauma pada korban, kecacatan, bahkan dapat mengakibatkan korban meninggal.
- 2) Dampak psikologis, Dampak psikologis dapat berupa rasa takut, rasa tidak aman, gelisah, dendam, menurunnya semangat belajar, hilangnya konsentrasi, menjadi pendiam, serta mental anak menjadi lemah, menurunnya rasa percaya diri, bahkan depresi. Dampak psikologi dapat dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Dampak psikologi ringan seperti resistensi terhadap lingkungan. Dampak psikologi sedang seperti pendiam, menutup diri atau dikenal dengan introvert. Dampak psikologi yang berat seperti bunuh diri.
- 3) Dampak seksual, Siswa yang mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan bisa saja akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang

seperti kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, gangguan/kerusakan organ reproduksi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

a. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: “kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.⁷

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karenanya anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak

⁷Arif Gosita, *Masalah Perlindungan* .

Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), h.34

yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT yang Maha Esa kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasahi dan menyanyangi anaknya.⁸

Perasaan kasih sayang Allah SWT tanamkan sebagai bekal dan dorongan orang tua untuk mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anakanak mereka sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, anak juga dikatakan sebagai amanah dari Allah SWT bagi orang tua yang mendapatkannya. Sebagai amanah yang diberikan

⁸Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 15.

anak harus mendapatkan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dari kedua orang tuanya. Anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, perawatan yang kesemuanya menjadi haknya. Jika amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, maka Allah SWT akan memberikan pahala dan balasan yang berlimpah bagi kedua orang tua tersebut, begitupun sebaliknya dosa bang orang tua yang karena kelalaiannya tidak dapat menjaga anak dengan baik sehingga menyebabkan anaknya celaka.

Orang tua sebagai orang yang diberi amanah memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap hak yang dimiliki anak agar dapat mendukung perkembangan anak dengan baik sehingga menumbuhkan karakter anak yang berakhlak mulia dan memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam. Anak bukan hanya merupakan aset tidak ternilai bagi orang tua, masyarakat dan bangsanya, tetapi anak juga sebagai pemilik masa depan. Oleh karena itu anak perlu dibimbing, dididik dan ditumbuhkan secara optimal baik secara fisik, mental spiritual, moral maupun intelektualitasnya. Anak adalah pewujud peradaban bangsa dan calon penerus generasi tua yang harus dipersiapkan agar menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual sehingga menjadi anak yang berkualitas⁹

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan Perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

⁹Ibid, h.16

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 4) Convention On The Rights Of Child (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
- 5) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat

kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang

efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.¹⁰

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- 1) Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹¹

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

¹⁰Maidin Gultom.. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung, Refika Aditama 2006), h. 12.

¹¹*Ibid*, h, 20.

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan dalam Perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.¹²

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu

¹²Arif Gosita, *Ibid*, h. 36.

berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT.¹³

Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

b. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. An-nisa [4]: 9)

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal

¹³Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI 2007), h.13

fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar atau tidak terpelihara.

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata, tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membacakan zikir. Ini artinya makhluk halus itu di luar jangkauan kita untuk mengatasinya oleh sebab itu kita mohonkan langsung pada Allah perlindungannya. Ibn Abbas menceritakan, bahwa Nabi SAW selalu membacakan ta'awwudz (bacaan mohon perlindungan) untuk al-Hasan dan al-Husain. Dalam riwayat lain, Aisyah menceritakan, bahwa Rasulullah saw pernah mendengar tangisan bayi kemudian beliau mendatangi rumahnya dan bertanya, kenapa bayi kalian menangis, mengapa tidak kalian ruqyah (jampi) dia dari penyakit 'ain (HR. Ahmad).

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan

sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.¹⁴ Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁵

Oleh karena itu ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan adalah sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

¹⁴Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

¹⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), h.8

hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak berhak atas perlindungan dari :

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi (ekonomi dan seksual)
- 3) Penelantaran
- 4) Kekejaman, penganiayaan
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan salah lainnya

c. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh

kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.¹⁶ Secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA¹⁷, hak hidup bagianak ini, dalam wacana instrumen/konvensi Internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama¹⁸
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara

¹⁶Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007), h. 11.

¹⁷<https://www.google.co.id/search?q=konvensi+hak+anak+PBB&oq=konvensi+hak+anak+PBB&aqs=chrome..69i57j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses tanggal 25 Mei 2016.

¹⁸Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang* (Jakarta: KPAI 2007), h. 12.

terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.

- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44)¹⁹
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

¹⁹*Ibid*, h. 14.

minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.

- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2)

Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²⁰ Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*),

²⁰Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, 45.

pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*).

1) Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

2) Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah SWT menegaskan dalam firmanNya:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyanyang.”²¹ (Q.S Al-Ahzab [33]: 5).

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan namaorang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak,

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 418.

sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berbakat atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan muharramat. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya²²

3) Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan

²²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI 2007), h. 7.

anak.²³Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui radha'ah (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

²³Ibid, h. 58.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)²⁴

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi di masyarakat dimana seorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad saw disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.

Selain penyusuan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi anak dalam Islam yang lain adalah khitan yang berarti memotong kulit yang menutupi kelamin. Khitan mengandung hikmah religius dan

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 37.

kesehatan. Hikmah religius sebagaimana diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai media kesempurnaan agama pembeda kaum muslimin dengan pengikut agama lainnya, keindahan dan menstabilkan syahwat. Hikmah kesehatan menurut Dr. Shabri Al-Qabani dalam bukunya *Hayatuna Al-Jinsiyyah* bahwa khitan mempunyai beberapa dampak higienis, yaitu seorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor, yang biasa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan, dan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.²⁵

Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak hanya dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam melindungi anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah dari penyakit adalah makan dan minum secara baik dan tidak berlebihan. Orang tua hendaknya membiasakan anak untuk makan, minum, dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Hal lain yang juga tak kalah penting harus diperhatikan bahwa asupan gizi baik melalui vitamin maupun makanan kepada anak harus diberikan dari hasil yang halal demi menjaga kesehatan rohani anak.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orang tua sudah memberikan perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka

²⁵Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h. 66.

generasi yang terbina akan memiliki kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia menjadi generasi muda yang siap mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardhi*.

4) Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'aql* (pemeliharaan atas akal). Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا فَأَنشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Mujadalah [58]: 11)²⁶

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 542.

senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak.²⁷

Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan diakhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Islam mengajarkan setiap anak untuk berakhlak mulia dengan cara mengajarkan amalan spiritual yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat yang tercantum dalam Surat Al-Rum ayat 17-18:

²⁷Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 17.

فَسُبِّحْنَ اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١١﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٢﴾

“Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur. (Q.S Ar-rum [30]: 11).

Pendidikan sejak dini bagi seorang anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai yang diberi amanah oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi orang tua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orang tua tidak mampu melakukan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

5) Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang

maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233)²⁸

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 34.

jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

1. Ruang Lingkup Kajian Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.²⁹

Sementara mengenai asal kata siyasah terdapat tiga pendapat :

- 1) Sebagaimana dianut al- Maqrizy menyatakan, siyaah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata “yasah” yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca siyasah. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- 2) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol Dan Ibnu Manzhur

²⁹Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, *Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

menyatakan, siyasah berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³⁰

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang di kemukakan oleh para yuridis islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³¹

Dalam redaksi yang berbeda, Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai suatu pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

b. Ruang lingkup Fiqih Siyasah

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun

³⁰Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), h.45

³¹*Ibid.*, h. 109

hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³²

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas Fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas Fiqh lain, dalam Fiqh siyasah juga menggunakan Ilmu Ushul Fiqh dan Qowaid fiqh.

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

Pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (al-Siyasah al-Dusturiyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (al-Siyasah al-Kharijah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (al-Siyasah al-Duali al'Am) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- 3) Politik keuangan dan moneter (al-Siyasah al-Maliyah). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.³³

c. Macam-Macam Kajian Fiqih Siyasah

1) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁴

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁵

2) Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah Maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan

³⁴H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

³⁵*Ibid*, h. 47-48

menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara (Ath Tasarruf). Istilah yang lain yaitu Intervensi Negara (Tadakhul ad Daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash shadr. Yang beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap.³⁶

Kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum Islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan Ekonomi. Dalam hal ini Masyarakat melaksanakan hukum yang sudah ada, sedangkan negara mengisi celah celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh Negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga

³⁶Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyashah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: SEARFIQH, Desember 2017, h. 4

menjamin Tercapainya tujuan-tujuan umum sistem aktivitas ekonomi Islam.

Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan Rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu Rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu Si Kaya dan Si Miskin, Di dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar Kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan Negara Mengelola zakat, Infaq, waqaf, sedeqah, Usyur dan Kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah 3 celah celah hukum dengan membuat kebijakan baru bagi masyarakat terkait tentang ekonomi. Kebijakan yang dibuat oleh Negara hendaknya sesuai dengan kondisi, dinamis, baik pada tataran praktis maupun teoritis, sehingga menjamin Tercapainya tujuan-tujuan umum sistem

aktivitas ekonomi Islam. Pengaturan Fiqih Siyasah Maliyah berorientasi untuk kemaslahatan Rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu Rakyat, harta dan Negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu Si Kaya dan Si Miskin, Di dalam Fiqh Siyasah Maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar Kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh Siyasah Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan Negara Mengelola zakat, Infaq, waqaf, sedeqah, Usyur dan Kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

3) Siyasah Qadha'iyah

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) tersebut, hukum hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (al-Qadha) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah Hisbah³⁷

4) Siyasah Harbiah

Harbiyah bermakna perang, secara kamus Harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian Fiqh Siyasahnya yaitu Siyasah Harbiyah adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

Siyasah Harbiyah juga dimaknai sebagai hubungan internasional dan menyakut masalah internasional mengatur kebijakan politik Negara Islam dalam masa damai maupun perang, dan menyakut tentang kebijakan Negara mengangakat duta dan konsul hak istimewa istimewa dan kebijakan-kebijakanya.

³⁷Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), h, 65.

B. Tinjauan Pustaka

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusunan selama ini, ditemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusunan:

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusunan dalam melakukan penelitian ini seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung)*, dalam penelitian bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum

Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan Allah swt yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Al Apid(2019), Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung), Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada Anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar Lampung. Dalam pandangan Fiqh Siyasah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS.An-Nisa ayat 9, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS.An-nisa ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam

menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

Hengki Komarudin yang berjudul “Upaya Perlindungan Anak oleh Pengelola rumah singgah Ahmad Dahlan terhadap Anak Jalanan” yang dibuat tahun 2012, di Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Upaya Perlindungan Anak yang membedakan dalam penelitian Hengki Komarudin adalah tempat penelitian dan membahas tentang bagaimana mengelola rumah singgah Ahmad Dahlan terhadap Anak Jalanan, sedangkan penulis membahas Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 tahun 2012 tentang perlindungan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Huraerah, *Child Abuse*, Cet 2, Bandung: Nuansa, 2007.
- Alam, Andi Syamsu Dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Al-Mawardi, Iman. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, Banda Aceh: SEARFIQH, 2017.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI. 2007.
- Arif Gosita. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta: Citra Adiya Bakti, 2015.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Damascus: Dâr al-Qalam, 2007.
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Retrika Aditama. 2008.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, Bandung : Mizan, 1996.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007).
- Ibnu Syarif, Mujaar, Zada, Khamami, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Imron, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Jakarta Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir*. 1992.

- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: SinarGrafika, 2013.
- MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 2006.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal Cet Ke-7*, Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Anak*, Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2004.
- Sukarja, Ahmad Syarief Ibnu Mugar. *Tiga Kategori Hukum (Syari'at, Fikih Dan Konun)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Susiadi. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung. 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Usman, Husaina Dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka, 1990.
- Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Inti Dayu Press, 1993.

Undang-Undang

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006.
- Perda Kabupaten Tanggamus No. 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.

UU No.39 Tahun1999 TentangHAM, HakAnakTerdapatDalamPasal 52-66.

Peraturan Bupati No.67 Tahun 2018 Kabupaten Tanggamus tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pasal 3.

Jurnal

Shalihah, Hani. 2018. “Al- Afkar, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal For Islamic Studies*, Vol. 1 No.1, Jakarta.

Wawancara dan lainnya.

Dokumentasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus, dicatat tanggal 9 maret 2020.

Fauzan abdur rohim, wawancara, (Sekretaris P2TP2A) Kabupaten Tanggamus, 12 maret 2020.

Fauzan abdur rohim, wawancara, (Sekretaris P2TP2A) Kabupaten Tanggamus, 12 maret 2020.

Parsiyem, wawancara, (Kabid Pemberdayaan Perempuan) dan Anak Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus, 9 maret 2020.

Parsiyem, wawancara, (Kabid Pemberdayaan Perempuan) dan Anak Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus, 9 maret 2020.

Riza Pahlewi, wawancara, (Sekretaris) Dinas PP dan PAKabupaten Tanggamus, 9 maret 2020.

Samirah, wawancara, (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus, 9 maret 2020.

Samirah, wawancara, (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus, 9 maret 2020.

SK Bupati TanggamusNomor : B.114/30/08/2019 Tentang tugas dan tanggung jawab pengurus P2TP2A Kabupaten Tanggamus, 12 maret 2020.